INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAGANG LANGSUNG ANTARA
INDONESIA-CINA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah guna memperlancar pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan dasar antara KADIN Indonesia dan China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) mengenai hubungan dagang langsung antara Indonesia-Cina yang telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
2. bahwa untuk itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai pedoman Penyelenggaraan Hubungan Dagang Langsung antara Indonesia-Cina;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Luar Negeri;
2. Menteri Kehakiman;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
6. Menteri Muda/Sekretaris Kabinet;
7. Panglima ABRI/Pangkopkamtib;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Kepala BAKIN.

Untuk :

Melaksanakan kebijaksanaan dan mengambil langkah-langkah guna membantu kelancaran hubungan dagang langsung antara Indonesia-Cina dengan menggunakan pedoman yang tertuang dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1985
TANGGAL 23 JULI 1985

PEDOMAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN
DAGANG LANGSUNG ANTARA INDONESIA-CINA

Mengingat belum adanya hubungan diplomatik antara kedua pemerintahan untuk membentuk kelancaran hubungan dagang langsung antara Indonesia-Cina perlu digariskan pedoman sebagai berikut :

I. Umum

Hubungan dagang langsung antara Indonesia Cina dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan umum perdagangan dan tataniaga yang digariskan oleh Pemerintah.

II. Komoditi Perdagangan

1. Pada prinsipnya semua komoditi perdagangan dapat diekspor ke Cina, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia atau badan-badan internasional yang menyangkut komoditi tersebut.
2. Pada prinsipnya semua barang-barang dari RRC dapat di impor dengan memperhatikan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah tentang perlindungan terhadap industri dari dalam negeri.

III. Tataniaga

1. Pada prinsipnya semua eksportir/importir dapat mengadakan transaksi langsung dengan Cina.
2. Para eksportir/importir dianjurkan mengadakan koordinasi/kerjasama yang sebaik-baiknya untuk menarik manfaat sebesar-besarnya.

IV. Tatacara Pembayaran

1. Pembayaran transaksi dagang dilakukan melalui prosedur pembukaan L/C atau prosedur-prosedur perdagangan lainnya yang lazim dengan pembayaran tunai.
2. Alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi adalah mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas. (convertible currencies).

V. Keimigrasian

1. Pelayanan pemberian visa kepada pedagang Cina yang akan memasuki Indonesia dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Hongkong atau di Singapura.
2. Visa dapat dipertimbangkan diberikan kepada pedagang Cina yang akan berkunjung ke Indonesia yang mendapat undangan dari KADIN Indonesia, dari asosiasi, Badan Usaha Milik Negara atau dari perorangan.
3. Untuk tujuan-tujuan perdagangan pada dasarnya setiap warga negara

Indonesia dan pegawai dari Badan Usaha Milik Negara diberikan izin berkunjung ke Republik Rakyat Cina.

4. Anak buah kapal bendera Republik Rakyat Cina yang berlabuh, di pelabuhan-pelabuhan Indonesia diizinkan turun dari kapal ke darat dalam lingkungan wilayah kerja pelabuhan yang bersangkutan.

VI. Pengangkutan

1. Pengangkutan barang dagangan antara Indonesia-Cina dapat menggunakan kapal berbendera Indonesia, kapal berbendera Cina ataupun kapal-kapal berbendera negara lain.
2. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dibuka untuk kapal berbendera Cina dalam rangka perdagangan langsung Indonesia-Cina, adalah :
 - a. Pelabuhan-pelabuhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perdagangan luar negeri, ialah Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Ujung Pandang;
 - b. Pelabuhan-pelabuhan lain yang segera di tentukan kemudian terutama di tempat-tempat yang menghasilkan komoditi ekspor dalam jumlah yang besar.

VII. Komunikasi

Untuk kelancaran hubungan dagang langsung Indonesia-Cina disediakan pelayanan komunikasi yang meliputi pelayanan telepon, teleks dan pos.

VIII. Koordinasi

1. Untuk jangka waktu tertentu yang akan diakhiri kemudian, koordinasi pelaksanaan hubungan dagang langsung Indonesia-Cina dilakukan oleh Menteri Muda/Sekretaris Kabinet.
2. Pelaksanaan teknis dari pedoman ini dilakukan oleh Departemen-departemen/Instansi-instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO